### Radar Bali



# Mantan Kadis Ngaku Dilobi Rp 250 Juta

#### Biar Kajian Toko Modern Diperlunak

GIANYAR - Hampir di seluruh Bali toko modern menjamur. Begitu pula di Gianyar. Minimarket berjaringan pun terus bermunculan. Jumlahnya kini sudah melebihi kuota.

Ternyata sejak 2014 lalu sudah ada upaya lobi untuk melabrak batas izin yang disediakan. Mantan kepala dinas (Kadis) pun angkat bicara mengenai lobi dengan nilai fantastis, Rp 250 juta per izin.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar yang kini menjabat sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Oka Wijaya mengakui adanya praktik percaloan dalam mengurus izin toko modern berjaringan di Gianyar.

"Calo-calo semacam itu benar ada," tegas Oka Wijaya yang kini menjabat staf ahli bupati Gianyar, itu kemarin (11/6).

Saat menjabat sebagai kepala BPPT Kabupaten Gianyar selama delapan bulan (Juni 2013-Februari 2014) dia mengaku sempat ditawari uang Rp 250 juta. Ini dimaksudkan agar menandatangani izin sebuah toko modern.

Saat itu, Oka Wijaya memilih menolaknya. "Saya tegas menolak. Saya katakan tidak ada izin baru untuk toko modern atas perintah bupati," ujar Oka Wijaya.

Tidak hanya itu, ada juga yang datang untuk meminta izin tiga lokasi toko modern di wilayah Kecamatan Ubud. Bahkan, orang itu meminta Oka untuk menyebut nominal uang yang diinginkan. "Bapak minta berapa? Beri saya tiga lokasi untuk toko modern. Uangnya ada, Pak," ujar Oka, meniru ucapan calo tersebut.

Selama menjadi kepala BPPT, Oka mengaku hanya mengeluarkan satu izin toko modern di wilayah Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar. Itu pun karena desakan masyarakat setempat dan diizinkan oleh bupati selaku pimpinannya.

Dijelaskan Oka, masyarakat di sana saat itu dijanjikan CSR oleh pemilik toko modern tersebut dan dalam jangka waktu beberapa tahun akan menjadi milik desa adat. "Di samping izinnya dari bawah lengkap, Pak Bupati juga men-

itulah saat dimutasi menjadi staf ahli bupati, dia langsung merasa bebas. "Saat mutasi, setelah nama saya disebutkan sebagai staf ahli, tanpa sadar dan secara spontan saya mengucapkan kata merdeka," pungkasnya.

Sementara itu, sejak hadirnya Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), spanduk bebas calo telah terpasang besar di pintu masuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Gianyar. Kepala PMPTSP Gianyar Ketut Mudana, tidak tahu menahu jika

toko modern itu sudah melebihi kuota. Justru pihaknya pada akhir 2016 lalu mengaku telah memohon kajian ke Universitas Udayana (Unud).

Kajian ini dilakukan untuk memastikan kuota toko modern yang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Kabupaten Gianyar. "Sekarang kami menyiapkan kajian baru yang disesuikan dengan kondisi saat ini. Kalau kuota 79 unit itu kan kajian lama" ujarnya

kajian lama," ujarnya.

Mudana mengungkapkan dari kajian baru ini diperkirakan akan ada penambahan jumlah toko modern berjejaring di kawasan Sukawati dan Ubud. "Perkiraan kami akan bertambah di dua wilayah itu, pertimbangannya Sukawati yang dekat dengan Denpasar dan Ubud yang merupakan pusat wisata," ujarnya.

Mudana membeberkan hasil pendataan terakhir yang dia lakukan terkait jumlah toko modern, bahwa di Kabupaten Gianyar terdapat 154 unit toko modern berjejaring. Dengan rincian 100 unit yang sudah berizin, 25 unit sedang dalam proses, dan 29 unit toko modern berjejaring yang tidak berizin. (dra/pit)

gizinkan. Sebagai bawahan bupati, saya keluarkan izin jadinya," terangnya.

Oka Wijaya juga menegaskan bahwa selama menjadi kepala perizinan dia tidak mau memberlakukan pungutan liar (pungli). Dirinya akan mengeluarkan izin sesuai dengan prosedur. "Saya tidak pernah minta uang dengan permohon izin. Mungkin kalau mau terima uang saya sudah kaya," tandasnya.

Diakui, selama menjabat kepala perizinan, Oka Wijaya mengaku kurang nyaman lantaran banyak tekanan. Karena

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 27

### Radar Bali



#### KORUPSI

## Kejari Sulit Eksekusi Aset Milik Candra

SEMARAPURA - Meski sudah dibui, sampai saat ini aset terpidana korupsi Dermaga Gunaksa, Klungkung, Wayan Candra belum bisa dirinci

secara detail. Akibatnya, baru sebagian kecil yang bisa dieksekusi.

"Aset-aset yang menjadi barang bukti sudah tertuang di dalam barang bukti. Hanya saja sebagian besar belum di eksekusi, seperti aset tanah," ujar Kasi Pidsus Kejari Klungkung Meyer V



DOK.RADAR BALI

Wayan Candra

Simanjuntak saat dihubungi, kemarin (11/6). Menurutnya, aset Candra yang berupa tanah sebenarnya sudah ditemukan hitam putihnya. Hanya saja saat ditinjau ke lokasi tanah tersebut berada, patok tanah sudah tidak ada semua

▶ Baca Kejari... Hal 27

# Yang Disita Baru Sebagian

**KEJARI..** 

Sambungan dari hal 17

"Saat turun ke lapangan, kami cukup kesulitan. BPN (Badan Pertanahan Nasional) maupun kelian subak tidak berani menunjukkan karena patoknya sudah tidak ada semua," ungkapnya.

Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memastikan batas-batas aset tanah yang dimiliki Candra adalah dengan mengundang pemilik tanah sebelumnya karena dipastikan lebih mengetahui posisi sebenarnya. Tapi, diakui Meyer bahwa strategi itu memiliki potensi menimbulkan konflik di lapangan. "Karena pembayaran tanah itu belum lunas dilakukan oleh Candra," katanya.

Diungkapkan Meyer, jika sebelumnya ada beberapa warga dan *kelian subak* yang datang ke Kejari Klungkung untuk menanyakan kelanjutan asetaset Candra yang ternyata belum dibayar lunas. Bahkan, ada warga yang ingin mengembalikan uang muka yang telah diberikan Candra agar tanahnya bisa didapatkan kembali.

Namun, karena sudah putusannya seperti itu, dijelaskan bahwa pihaknya harus melaksanakan. "Kalau yang sudah jelas posisi, kedudukan, dan status sudah kami sita. Semoga untuk aset yang lainnya nanti bisa ditemukan jalan keluarnya," tandasnya. (ayu/pit)

Edisi : Serin, 12 Juni 2017

Hal : 17 dan 27